

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan yang harus dipenuhi adalah akses terhadap sanitasi dasar yang layak. Pada dasarnya, kebutuhan tersebut menjadi hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan, baik dari segi produktivitas maupun daya saing masyarakat di Indonesia. Dengan kata lain, masyarakat merupakan sumber daya yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan akses terhadap sanitasi dasar yang layak perlu dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang sehat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Amsyari (1996:138), salah satu faktor penting bagi kesejahteraan penduduk adalah kesehatan lingkungan. Sejatinya, lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya keadaan makhluk hidup, manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Sucipto & Asmadi, 2011:24). Sehingga perlu diperhatikan bahwa lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah kesehatan dapat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan sekitar. Singkatnya, lingkungan yang sehat mencerminkan masyarakat yang sehat pula. Secara garis besar, tujuan pokok kesehatan bagi masyarakat adalah untuk pencegahan timbulnya penyakit, memperpanjang usia hidup, serta meningkatkan kesehatan penduduk (Notoatmodjo, 2011: 15). Oleh karena itu, diperlukan usaha yang optimal untuk mewujudkan tujuan pokok tersebut.

Adapun yang menjadi hambatan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat adalah permasalahan sanitasi yang buruk. Masih banyak ditemukan masyarakat yang belum memiliki fasilitas buang air besar. Adanya sarana tempat buang air besar, menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk menunjukkan bagaimana kualitas hidup dari masyarakat. Berdasarkan Profil

Kesehatan Indonesia pada Tahun 2006, rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar sebesar 19,67%. Pada tahun berikutnya, menunjukkan pula bahwa persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar mengalami peningkatan menjadi sebesar 22,85% (Profil Kesehatan Indonesia, 2006; 2007). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sanitasi dasar di tengah masyarakat belum terpenuhi secara keseluruhan. Masalah tersebut akhirnya dapat memicu perilaku buang air besar sembarangan di kalangan masyarakat yang belum memiliki fasilitas tempat buang air besar. Menurut Wardiha (2017:55), “Buang air besar sembarangan (BABS) merupakan suatu tindakan membuang kotoranf atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai, atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara, dan air.”Studi observasi yang dilakukan oleh USAID/Indonesia menyatakan bahwa fenomena tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh faktor psiko-sosial, jika dilihat secara kognitif masyarakat yang buang air besar sembarangan terutama di sungai, beranggapan bahwa dengan membuang hajat di sungai akan menghemat air dan daya listrik. Selain itu, masyarakat telah terbiasa melakukan aktivitas tersebut karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari leluhur, ditambah lagi lokasi sungai yang dekat dengan rumah penduduk justru semakin memfasilitasi mereka untuk membuang air besar di sungai. Sedangkan, secara emosional, masyarakat lebih nyaman buang air besar di tempat terbuka karena dirasa lebih mudah untuk buang air besar di sungai ketimbang di toilet (USAID/Indonesia, 2006 : 32).

Berdasarkan hasil riset dari *Indonesian Sanitation Sector Development Program*(ISSDP) pada tahun 2006, menyatakan bahwa persentase masyarakat di Indonesia yang masih buang air besar sembarangan sebesar 47%. Sebagai pengganti jamban, masyarakat biasanya membuang kotoran tinja di tempat terbuka seperti sungai, sawah, kebun, dan kolam (Kementerian Kesehatan RI, 2008).Kebiasaan masyarakat yang melakukan tindakan buang air besar sembarangan, tanpa disadari dapat memicu berkembangbiaknya bibit penyakit seperti bakteri, virus, maupun cacing. Kondisi ini jika dibiarkan akan

mempengaruhi kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan penyebaran penyakit berbasis lingkungan bagi masyarakat.¹ Mengenai hal tersebut, ada beberapa contoh penyakit yang dapat disebarkan melalui kotoran manusia diantaranya yaitu diare, cacangan, kolera, dll (Yuva & S.Bekti, 2019). Bersumber pada hasil survei mortalitas subdit ISPA pada tahun 2005, diare menempati urutan ke-4 penyebab kematian bayi di Indonesia dengan persentase sebesar 9,1% dapat dilihat pada Tabel I.1 di bawah ini.

Tabel I. 1 Penyebab Kematian Bayi di Indonesia (Hasil Survey Mortalita Subdit ISPA 2005)

No	Penyebab Kematian	Persentase
1.	Neonatal	44,5
2.	Pneumonia	22,3
3.	Infeksi Berat	10,6
4.	Diare	9,1
5.	Masalah lain	5,5
6.	Gizi Buruk dan BGM	1,7
7.	Demam Berdarah Dengue	1,4
8.	Muntah-Dehidrasi	1,3
9.	Tifoid	1,2
10.	Malaria	0,8
11.	Campak-Komplikasi	0,8
12.	Pertusis	0,3
13.	Tanpa Penyebab	0,6

Sumber : Profil Kesehatan Indonesia, 2006

Selanjutnya, dalam Profil Kesehatan Indonesia tercatat jumlah kematian akibat penyakit diare pada tahun 2005 sebanyak 127 orang dari total 5.051 kasus. Pada tahun 2006, jumlah kematian akibat diare mengalami kenaikan yaitu

¹Bahaya Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) diakses di <https://dinkes.riau.go.id/bahaya-perilaku-buang-air-besar-sembarangan-babs> pada tanggal 29 November 2019 pukul 12.36

sebanyak 277 orang yang meninggal dari jumlah 10.980 kasus. Menurut Laporan Riskesdas Tahun 2007, diare menempati urutan ke-13 penyebab kematian untuk golongan semua umur dengan proporsi kematian sebesar 3,5% (Profil Kesehatan Indonesia, 2007:29). Dari paparan data tersebut, menyatakan bahwa perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat juga turut berkontribusi terhadap kasus penyebaran wabah penyakit diare hingga menjadi penyebab kematian bayi maupun golongan semua umur di Indonesia.

Mengingat bahwa kesehatan masyarakat juga merupakan salah satu kepentingan publik, pemerintah sendiri telah memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya agar mendapatkan hak untuk memiliki hidup yang layak dan sehat. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.² Dalam menghadapi isu penting ini, Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mencapai kepentingan publik tersebut dengan membuat suatu kebijakan melalui program yang relevan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memerlukan pendekatan baru dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Pendekatan tersebut dituangkan dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) merupakan pendekatan yang ditujukan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi dengan cara pemberdayaan masyarakat melalui penerapan metode pemucuan. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan No.852/Menkes/SK/IX/2008 menjadikan pedoman bagi pelaksanaan strategi nasional terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Namun, sejak tahun 2014 pelaksanaan STMB diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014. Tujuan program STMB yaitu untuk memperkuat perilaku hygiene dan saniter

²Undang-Undang Dasar 1945 diakses di http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/undang-undang-dasar-1945--uud-1945-#XXt_ahaySEc pada tanggal 30 November 2019 pukul 16:54

kepada masyarakat secara mandiri agar dapat mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, pada pasal 3 ayat (2) tertulis bahwa program STMB mempunyai lima pilar yang dapat diterapkan oleh masyarakat untuk berperilaku hidup sehat yakni (1) Stop Buang Air Besar Sembarangan; (2) Cuci Tangan Pakai Sabun; (3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga; (4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan (5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PERMENKES Nomor 3 Tahun 2014).

Pada pelaksanaan STBM, output yang diharapkan adalah komunitas masyarakat di Indonesia terutama pada desa dapat mewujudkan Pilar I yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (ODF). Program ODF atau *Open Defecation Free* merupakan usaha untuk menciptakan kondisi individu masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan.

Program tersebut juga diturunkan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan otonomi yang dimiliki. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah juga mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan sanitasi dasar pada masyarakatnya. Salah satu daerah yang menerapkan Program *Open Defecation Free* (ODF) ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pada awal masa pemerintahan periode pertama Bupati Suyoto, Bojonegoro dihadapi tantangan berupa permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada proses pembangunan daerah. Salah satunya yaitu perilaku masyarakat di Bojonegoro yang masih buang air besar sembarangan (Rahayu, 2015). Menurut Abdul Muhid, dkk (2018) ada beberapa faktor yang menyebabkan BABS masih terjadi di Bojonegoro yaitu (1) Faktor Geografis. Sebagaimana yang diketahui Kabupaten Bojonegoro dilewati oleh Sungai Bengawan Solo; (2) Faktor Sosial Budaya. Berkaitan dengan kondisi wilayah Bojonegoro tersebut, akhirnya menciptakan interaksi dan ketergantungan terhadap masyarakat untuk terbiasa buang air besar sembarangan; (3) Faktor Pelayanan Kesehatan. Masyarakat merasa bahwa pelayanan kesehatan yang diterima masih belum merata akibat dari keterbatasan akses kesehatan dan minimnya tenaga kesehatan; (4) Faktor Ekonomi. Rendahnya pendapatan

masyarakat menanamkan pola pikir yang kurang peduli terhadap kesehatan sanitasi.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk memfokuskan pembangunan ke arah peningkatan daya saing pedesaan di Bojonegoro melalui pelaksanaan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas. Pelaksanaan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) dilandasi oleh Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan bahagia. Program ini diukur menggunakan dua parameter yakni parameter sehat dan parameter cerdas. Berkaitan dengan permasalahan masyarakat yang buang air besar sembarangan, adapun salah satu indikator yang digunakan dalam parameter sehat yaitu *Open Defecation Free*.

Sehubungan dengan jalannya program *Open Defecation Free* di Kabupaten Bojonegoro, salah satu aspek yang diperhatikan adalah akses jamban pada masyarakat. Data perkembangan akses jamban Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut ini.

Tabel I. 2 Akses Jamban Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 - 2019

Tahun	Akses Jamban	
	KK	%
2014	257.075	75.88%
2015	266.418	79.08%
2016	284.302	83.58%
2017	315.640	90.16%
2018	323.738	92.96%
2019	326.682	93.68%

Sumber : <http://monev.stbm.kemkes.go.id/>

Pada Tabel I.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2014, persentase akses jamban di Kabupaten Bojonegoro sebesar 75,88%. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar 3,2% dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2015 ke 2016, persentase akses jamban meningkat kembali yaitu sebesar 6,5%. Kemudian, pada tahun 2017,

persentase bertambah menjadi sebesar 6,58%. Peningkatan juga terlihat pada tahun 2018 yaitu sebesar 92,96% masyarakat Bojonegoro telah mendapat akses jamban. Hingga pada tahun 2019, persentase akses jamban meningkat sebanyak 0,72%. Dapat disimpulkan bahwa, perkembangan akses jamban di Bojonegoro dari tahun 2014-2019 secara signifikan mengalami peningkatan terus menerus yang akhirnya berdampak pada penurunan aktivitas buang air besar sembarangan (BABS) pada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Rincian data tentang jumlah kasus BABS di Kabupaten Bojonegoro disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 3 Kasus BABS di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2019

Tahun	Jumlah Kasus BABS	
	KK	%
2014	81.774	24, 12%
2015	71.311	20, 92%
2016	58.660	16, 42%
2017	38.509	9, 84%
2018	28.176	7, 04%
2019	25.697	6, 32%

Sumber : <http://monev.stbm.kemkes.go.id/>

Dari tabel di atas, data menunjukkan bahwa pada tahun 2014 jumlah kasus BABS di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 81.774 KK. Pada tahun 2015, tercatat jumlah kasus BABS berkurang sebanyak 10.463 KK dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, jumlah kasus mengalami penurunan sebanyak 12.711 KK. Lalu, dari tahun 2016 ke 2017 jumlah kasus kian berkurang hingga mencapai 20.151 KK. Berkurangnya kasus BABS juga terlihat pada tahun 2018 yaitu sebanyak 10.333 KK. Hingga pada tahun 2019, total kasus BABS di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 25.697 KK. Melalui program ini menunjukkan adanya perubahan yang baik perihal kasus BABS di Kabupaten Bojonegoro. Jika dilihat kembali pada tabel I.3 terdapat perbandingan dari tahun ke tahun

jumlah kasus BABS di Bojonegoro mengalami penurunan. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *OpenDefecation Free* (ODF) di Kabupaten Bojonegoro berjalan dengan baik.

Keberhasilan ODF harus didukung oleh komponen utama yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat agar bersedia melaksanakan ODF, sehingga dapat tercipta lingkungan yang sehat. Selain itu, dibutuhkan komitmen dari pihak kecamatan serta keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan ODF ini. Adanya dukungan biaya dan SDM yang memadai juga dapat mendukung keberhasilan program ini (Supriyanto, 2017). Sehingga, dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program ODF dibutuhkan kolaborasi antar *stakeholder*, karena hal tersebut dapat mengatasi keterbatasan sumber daya. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan dengan melakukan kolaborasi yaitu mengatasi pengeluaran biaya yang berlebihan, meningkatkan sumber daya, serta berbagi keahlian (Percik, 2013). Istilah kolaborasi sering digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk membangun relasi pada suatu pelaksanaan program. Kolaborasi berarti bekerjasama dengan orang lain yang di dalamnya terdapat aktor baik berupa individu, kelompok, atau organisasi yang bekerja sama dalam beberapa hal. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan menyadari bahwa dibutuhkan jaringan dalam implementasi dengan menjangkau badan-badan lain yang memiliki kepentingan yang sama. Kolaborasi dapat menjadi salah satu instrumen yang penting dalam kebijakan publik, Pemerintah dapat mengandalkan kolaborasi untuk meningkatkan formulasi kebijakan serta meningkatkan implementasi agar layanan dapat lebih terintegrasi (Wanna, 2008).

Adapun beberapa dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan program ODF yang dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel I. 4 Perbandingan Penelitian

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
Nama Peneliti	Della Putri Arifianty	Farah Shabrina; Hadi Suryono; dan Mamik	Yuva Naelana; S. Bekti Istiyanto
Judul Penelitian	Peran Pemerintah Lokal dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan Masyarakat : Studi Tentang Keberhasilan Program <i>Open Defecation Free</i> (ODF) di Kabupaten Bojonegoro (2017)	Pengelolaan Program Open Defecation Free (ODF) di Puskesmas Temayang Kabupaten Bojonegoro Tahun (2018)	Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dalam Mewujudkan “Kabupaten Tegal <i>Open Defecation Free</i> 2019” (2019)
Teori yang dipakai	<i>Stakeholder</i>	Fungsi Manajemen	Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat
Metode Penelitian	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif	Deskriptif dengan Pendekatan <i>cross sectional</i>	Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Observasi, Studi Dokumen, dan Wawancara	Observasi, Survei dan Wawancara terhadap responden	Studi Dokumen, Wawancara
Hasil Penelitian	Peran pemerintah lokal sangat dominan dalam pelaksanaan ODF di Bojonegoro dengan beberapa aspek sebagai penentu keberhasilan	Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penerapan fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik dengan persentase	Diperlukan komunikasi yang intensif, aktif, dan efektif dalam pelaksanaan program ODF agar dapat berhasil mengubah perilaku

	<p>program ini diantaranya yaitu strategi dan perencanaan; advokasi dan promosi; peningkatan kapasitas; pengawasan, <i>monitoring</i> dan evaluasi; pemerintah sebagai regulator; pemerintah sebagai koordinator; pemerintah sebagai inovator dan fasilitator program.</p>	<p>yaitu sebesar 78.6%.</p>	<p>masyarakat buang air besar sembarangan.</p>
--	--	-----------------------------	--

Berdasarkan tabel I.4 di atas, tiga penelitian terdahulu memiliki kesamaan fokus yaitu membahas tentang program *Open Defecation Free* (ODF). Penelitian pertama pada tahun 2017 dilakukan oleh Della Putri Arifianty dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah lokal bagi pelaksanaan Program ODF guna mewujudkan peningkatan sanitasi di Bojonegoro. Pembahasan pada penelitian ini, lebih menekankan teori *stakeholder* yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder, dan *stakeholder* kunci. Penelitian kedua dilakukan oleh Farah Shabrina, Hadi Suryono, dan Mamik pada tahun 2018 bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Program ODF yang dilaksanakan di Puskesmas Temayang Kabupaten Bojonegoro dilihat dari perspektif manajemen dengan menggunakan penerapan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Sedangkan, penelitian ketiga yang telah dilakukan oleh Yuva Naelana dan S. Bakti Istiyanto pada tahun 2019 bertujuan untuk meneliti upaya

Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengkomunikasikan pembangunan daerah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui Program STBM.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan konsep proses kolaborasi oleh Ansell tertarik untuk mengungkap proses kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam Program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Bojonegoro serta bagaimana hasil pelaksanaan tersebut berdasarkan aspek pendukung keberhasilan program.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses kolaborasi antar *stakeholder* dan aspek pendukung keberhasilan Program *Open Defecation Free* ODF di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang proses kolaborasi antar *stakeholder* dan aspek pendukung keberhasilan dalam Program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan pembahasan yang sama yaitu tentang Program *Open Defecation Free*, ditemukan perbedaan atau celah dalam *state of the art* penelitian dengan hasil

penelitian sebelumnya. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Della Putri Arifianty membahas Program ODF dengan menggunakan perspektif *stakeholder*, yang mana menekankan peran dari pemerintah lokal dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian kedua dilakukan oleh Farah Shabrina, dkk yang membahas pelaksanaan ODF dengan menggunakan teori fungsi manajemen. Penelitian ketiga dilakukan oleh Yuva Naelana dan Bekti mengkaji tentang pelaksanaan Program ODF dengan melihat perspektif komunikasi pemberdayaan masyarakat serta *locus* penelitian di Kabupaten Tegal. Sehingga, secara akademis hasil penelitian ini mengisi celah yang ada dengan beberapa penelitian sebelumnya, yang mana pada penelitian ini menggambarkan secara rinci umum mengenai fenomena yang terjadi dengan menggunakan konsep dalam ilmu administrasi negara yang relevan yaitu kolaborasi *stakeholder*. Dengan harapan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, yakni sebagai bahan rujukan maupun perbandingan bagi riset-riset selanjutnya yang membahas tentang proses kolaborasi *stakeholder*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pihak (*stakeholder*) yang terlibat terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah khususnya di bidang kesehatan masyarakat melalui program *Open Defecation Free* (ODF). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu membagikan informasi terkait bagaimana proses kolaborasi yang dijalankan dalam program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Bojonegoro sehingga, kedepannya para *stakeholder* yang terlibat dapat terus berperan aktif dalam membangun kerjasama melalui kolaborasi yang baik untuk mencapai keberhasilan program daerah.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1. Kolaborasi *Stakeholder*

Konsep kolaborasi berasal dari bahasa Latin yaitu *Collaborare* yang artinya bekerja sama. Kolaborasi merupakan proses berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab bersama untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan (Camarihna-Matos & Hamideh, 2008). Secara umum, kolaborasi dipandang sebagai suatu proses interaktif yang melibatkan negosiasi antar organisasi, pengembangan dan penilaian komitmen, serta implementasi dari komitmen untuk mencapai kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kolektif (Thomson, Perry, and Miller 2014). Hal demikian juga dijelaskan oleh Thomson dan Perry (2006), dalam artikel penelitian yang sebelumnya bahwa kerangka kerja dari kolaborasi menunjukkan bahwa kolaborasi dapat terjadi seiring berjalannya waktu ketika organisasi berinteraksi baik secara formal maupun informal melalui proses negosiasi yang dilakukan berulang-ulang, pengembangan dan pelaksanaan komitmen. Djumiarti (2018) menerangkan ada beberapa dimensi yang dapat dilihat melalui kolaborasi yaitu:

- 1) Hubungan kemitraan (*partnership*) untuk pembangunan masyarakat, konsistensi pembangunan, dan komitmen antar aktor;
- 2) Kolaborasi sebagai alat untuk negosiasi dan persetujuan bersama;
- 3) Kolaborasi sebagai titik pusat dalam penyusunan regulasi serta pengawasan dan koordinasi;
- 4) Kolaborasi melahirkan sumber kekuatan dan otoritas;
- 5) Komitmen antar aktor terlihat; dan
- 6) Kolaborasi dapat memotivasi orang-orang yang terlibat dalam program.

Kolaborasi dapat memberikan arahan bagi organisasi yang terlibat kepada proses pembelajaran dan berbagi pengalaman bersama. Hal tersebut juga dapat mengarahkan untuk pengembangan kapasitas baik di dalam maupun di luar

organisasi. Komitmen terhadap kolaborasi juga mampu mendorong perubahan bagi organisasi dan mempengaruhi realokasi sumber daya (Wanna, 2008:9). Himmelman dalam Sobandi dan Noviantari (2015) memandang kolaborasi sebagai istilah dasar dalam bekerjasama dengan menggambarkan kolaborasi memiliki hubungan kerjasama dengan orang lain, membangun jaringan dan koordinasi sebagai wujud pembangunan strategi secara kontinu.

Sementara itu, Gray dalam Barbara Gray dan Donna J.Wood (1991) mendefinisikan kolaborasi sebagai sebuah proses yang dilalui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai aspek masalah untuk mengeksplorasi secara konstruktif perbedaan pemikiran yang dimiliki untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, sehingga dapat melampaui batas visi mereka yang kemungkinan akan terjadi. Menurut Nunamaker dalam Nabukenya (2005), kolaborasi dapat diartikan sebagai sejauh mana orang dalam suatu organisasi dapat menggabungkan upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kolaborasi merupakan upaya kerjasama yang dilakukan antar organisasi melalui pelaksanaan komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Selaras dengan arti kolaborasi, kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan (*Collaborative Governance*) memiliki arti yang sama dengan pengertian kolaborasi pada umumnya. Menurut Emerson et.al. (2011:2) *Collaborative Governance* diartikan sebagai proses dan struktur dari pembuatan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif melintasi batas dari lembaga publik, level pemerintahan, sektor privat dan sipil untuk mewujudkan tujuan publik yang belum tercapai. Konsep *Collaborative Governance* ini mewakili keseluruhan pendekatan keterlibatan publik dan partisipasi yang menyediakan kesempatan untuk menanamkan sistem pemerintahan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi yang lebih baik (Vodden, 2009: 69). Kemudian, Tang & Mazmanian (2008: 5) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai konsep yang menggambarkan proses membangun, mengarahkan, memfasilitasi, operasi dan

pengawasan dalam pengaturan organisasi lintas sektor untuk mengatasi masalah kebijakan publik yang tidak dapat ditangani hanya oleh satu lembaga publik saja. Lebih lanjut lagi, Ansell dan Gash (2007) mengungkapkan definisi dari *Collaborative Governance* adalah pengaturan pemerintahan yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga publik melibatkan langsung aktor non-pemerintah ke dalam sebuah proses pembuatan kebijakan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, serta deliberatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik maupun mengelola program atau aset publik.

Tata kelola pemerintahan meliputi pembangunan dan pemberian pelayanan publik membutuhkan kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. *Collaborative Governance* dalam praktiknya menambahkan nilai-nilai publik pada proses tata kelola pemerintahan. Hal tersebut memungkinkan bagi pihak yang terlibat dalam kolaborasi dapat mempelajari cara baru untuk melakukan banyak hal yang dapat memberikan manfaat antar lembaga atau organisasi serta pengelolaan pengetahuan (Shergold, 2008). Sedangkan Wanna (2008:9) kolaborasi dalam implementasinya memberikan manfaat dalam memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, menggabungkan keterampilan dan kapasitas yang relevan, serta pembentukan spesialisasi. Manfaat tersebut memungkinkan pelaksanaan birokrasi publik menjadi lebih efektif dalam membuat kebijakan.

Pada dasarnya, *Collaborative Governance* ditujukan bagi kebijakan publik dan sistem lintas organisasi yang berorientasi pelayanan yang melibatkan berbagai kepentingan (Emerson & Gerlak, 2013). Bingham (2011) menyebutkan bahwa di dalam pelaksanaan kolaborasi juga melibatkan proses pembuatan, peningkatan, dan pembangunan modal sosial dan organisasi dalam mencapai tujuan. *Collaborative Governance* telah muncul sebagai bentuk kelembagaan untuk menyediakan barang maupun layanan publik yang akhirnya berkembang ke area kebijakan meliputi bidang perlindungan lingkungan dan sumber daya, pembangunan infrastruktur, pengembangan masyarakat, pemberian layanan

kesehatan, dan pendidikan (Tang & Mazmanian, 2010: 1). Wang (2014) menjelaskan bahwa inti dari konsep *Collaborative Governance* adalah kolaborasi dan kerjasama yang mungkin terjadi diantara pemerintah, perusahaan, organisasi non-pemerintah, atau dapat dikatakan terjadi diantara pemerintah dengan dua sektor lainnya. *Collaborative Governance* berfokus pada pendekatan dimana lembaga publik memulai proses pengambilan keputusan bersama dengan aktor-aktor non-pemerintah untuk mencapai solusi dalam menyelesaikan masalah kebijakan publik yang lebih konkrit (Bartenberger & Verena, 2014). Argumentasi lain mengenai *Collaborative Governance* dikemukakan oleh Freeman dalam Purbani (2017) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola pemerintah yang kolaboratif yaitu dibutuhkan kegiatan pemecahan masalah, partisipasi luas, hasil atau solusi sementara, pembagian tanggung jawab antara lembaga publik maupun privat yang terlibat secara fleksibel.

Kolaborasi sangat bergantung pada partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga seringkali kaitannya sangat erat dengan keterlibatan dari *stakeholder*. Istilah *Stakeholder* sendiri pertama kali muncul pada tahun 1963 melalui peristiwa memorandum internal di Stanford Research Institute. Para ahli dan praktisi kemudian mengembangkan teori manajemen menggunakan istilah *stakeholder* untuk menjelaskan permasalahan manajemen (Parmar et.al 2010). Kemudian, awal berkembangnya studi tentang *stakeholder* berawal dalam dunia bisnis dikemukakan oleh Freeman melalui perspektifnya yang menyatakan bahwa organisasi bisnis harus memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain ketika mengambil keputusan. Konsep ini pun dianggap penting dan berkembang seiring berjalannya waktu karena menyangkut kepentingan publik (Mainardes et.al 2011). Menurut Freeman dalam Friedman dan Miles (2006) menyebutkan secara klasik, *stakeholder* merupakan tiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Gaur (2013), bahwa *stakeholder* ialah orang, kelompok atau organisasi yang memiliki

kepentingan dalam suatu organisasi. *Stakeholder* dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, maupun kebijakan yang dilakukan organisasi. Sedangkan, Tengan & Aigbavboa (2017) mengatakan bahwa *Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki manfaat langsung dan tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu program. Tiap individu tersebut disatukan agar berinteraksi dan membangun hubungan untuk melaksanakan program dengan tujuan mencapai standar yang telah ditetapkan, dengan demikian mereka memiliki kepentingan yang sama untuk keberhasilan program. Alsos et.al (2011) juga berpendapat bahwa penggunaan konsep *stakeholder* ini dapat membantu untuk memahami lingkungan dan konstituen yang berbeda dalam rangka mengelola organisasi secara efektif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *Stakeholder* merupakan individu, kelompok, maupun organisasi yang mempunyai kesamaan kepentingan dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Nugroho, dkk (2014) menyebutkan ada lima kategori *stakeholder* jika dikaitkan dengan peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan atau program yaitu sebagai berikut:

1) *Policy Creator*

Stakeholder yang berperan sebagai pembuat kebijakan. Mereka memiliki legalitas kewenangan dalam mengambil keputusan sehingga keberadaannya sangat penting untuk menentukan arah kebijakan.

2) Koordinator

Berperan untuk mengelola kebutuhan dan kepentingan dari *stakeholder* lain dengan cara menyatukan komitmen antar *stakeholder* dan penyampaian visi.

3) Fasilitator

Berperan untuk membantu memfasilitasi kebutuhan program.

4) Implementer

Berperan sebagai pelaksana kebijakan serta dapat menjadi subjek dari implementasi program.

5) Akselerator

Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program agar berjalan secara efektif sesuai dengan sasaran dan batas waktu yang ditetapkan.

Lebih lanjut lagi, Ginige et.al (2018) memetakan kategori *stakeholder* menjadi beberapa tipe sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* dalam menjawab tantangan global. Penjelasan tentang tipe *stakeholder* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I. 5 Kategori Stakeholder dan Definisi

Stakeholder Type	Definition	Responsible For
National and local government:	Public and semi-public entities that have interest in Global Challenges and research priorities	Mediate between private and public interests and as an actor with local, national and international connections. Coordination of different stakeholders at different levels Develop and enforce rules, laws and regulations.
International organisations:	Non-profit making organisations which possess membership of more than one country and set up as intergovernmental organisations or international non-governmental organisations	Policy making Coordination among different nations Provide necessary aid and support
Community:	Individuals and groups that has direct interest in Global Challenges	Users and occupants Participation, experience and leadership towards the necessary actions.
Civic society:	Non-governmental organisations (NGOs) that participate in research related Global Challenges, including not-for-profit and voluntary groups that are organised on a local, national or international level	Work with and on behalf of most needy groups: the poorest and the most vulnerable. Operate at grassroots level with communities and local organisations as partners. Take a participatory approach to development planning. This allows them to respond better to local people's priorities and build on local capacities.
Private and corporate sector:	Privately owned profit-orientated business and industrial groups	Driving force behind socio-economic development. Developers, consultants, contractors and sub contractors, banks and finance institutions that design, construct, maintain and finance the necessary infrastructure/facilities. Responsible for implementation of policies, regulations and standards
Academia and professional associations:	Universities, research organisations, and professional associations engaged in research, and training and development of individuals and organisations involved in Global Challenges	Related education. Training. Research and development. Development of technical standards and guidelines.

Sumber : Ginige et.al (2018)

Pada tabel I.5 dapat diketahui bahwa terdapat enam kategori *stakeholder* yang disampaikan oleh Ginige. Pertama, Pemerintah Pusat dan Daerah. Merupakan instansi publik yang memiliki minat untuk menghadapi tantangan global dan prioritas penelitian. Mereka bertanggung jawab atas proses mediasi antar aktor, berperan sebagai koordinator berbagai *stakeholder* serta mengatur kebijakan. Kedua, Organisasi Internasional. Merupakan organisasi nirlaba dengan ruang lingkup internasional yang beranggotakan lebih dari satu negara baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Mereka juga bertanggung jawab

dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antar negara serta mengakomodasi bantuan dan dukungan yang dibutuhkan. Ketiga, komunitas. Merupakan individu atau kelompok yang memiliki minat terhadap tantangan global dan berpartisipasi dalam mengambil tindakan. Keempat, *civil society*. Merupakan organisasi non-pemerintah yang berpartisipasi dalam tantangan global seperti contoh, kelompok sukarelawan. Mereka bekerjasama dengan masyarakat dan membangun kemitraan melalui pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat merespon terhadap prioritas kebutuhan masyarakat. Kelima, Sektor Privat dan Perusahaan. Merupakan *stakeholder* yang terdiri dari organisasi swasta yang berorientasi laba atau kelompok bisnis. Berperan sebagai pendorong kekuatan dalam pembangunan sosial-ekonomi berupa konsultan dan pengaturan infrastruktur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Keenam, Akademisi dan Asosiasi Tenaga Profesional. Terdiri dari lembaga pendidikan seperti universitas dan organisasi penelitian yang terlibat dalam pelatihan dan pengembangan individu maupun organisasi untuk menghadapi tantangan global. Bertugas dalam memberikan edukasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan standar dan pedoman teknis.

Menurut Crosby dalam Alviya, dkk (2016: 130) menerangkan bahwa *stakeholder* dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder, dan *stakeholders* kunci. *Stakeholder* primer (utama) ditujukan untuk pemangku kepentingan yang berkaitan secara langsung terhadap dampak suatu program. *Stakeholder* sekunder (pendukung) ditujukan untuk pemangku kepentingan yang mempunyai peran sebagai mediator dalam pelaksanaan kegiatan program karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Sedangkan, *stakeholders* kunci merupakan pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh kuat akan masalah dan kebutuhan terhadap berjalannya suatu kegiatan program.

Stakeholder kunci yang terlibat dalam program ini yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup,

Puskesmas. *Stakeholder* sekunder yang terlibat dalam program ini yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat IDFos dan Inspektra. Sedangkan, *stakeholders* utamanya yaitu masyarakat sebagai sasaran Program ODF.

Dalam konteks penelitian yang telah dijelaskan, *stakeholder* mempunyai peran penting dalam kolaborasi. Kolaborasi *stakeholder* mempunyai makna yaitu suatu proses kesepakatan bersama dalam memecahkan masalah yang melibatkan penyatuan sudut pandang yang berbeda di antara berbagai pihak sehingga mampu menghasilkan visi untuk pencapaian tujuan. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) perlu melakukan koordinasi usaha mereka dengan menghubungkan kegiatan, manfaat, dan sumberdaya melalui pengaturan kolaboratif (Leeb & Rudeberg, 2014: 3).

1.5.1.1. Input Kolaborasi

Sebelum melalui tahap proses kolaborasi, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan untuk dijadikan sebagai input kolaborasi. Adapun Ansell dan Gash (2007: 550-557) menyebutkan tiga input kolaborasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Starting Condition

Kondisi pada awal kolaborasi terjadi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah kolaborasi memerlukan dukungan atau bahkan pencegahan untuk melakukan kerjasama antar *stakeholder*. Mengenai hal tersebut, ada tiga variabel dari kondisi awal kolaborasi yaitu (1) Keseimbangan antara kekuasaan dengan sumberdaya. Hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kolaborasi adalah para *stakeholder* pun harus mempunyai kapasitas dan sumberdaya untuk berpartisipasi, jika tidak maka akan rentan dimanipulasi oleh *stakeholder* yang lebih kuat. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara kekuasaan dengan sumberdaya yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan. (2) Intensitas dalam berpartisipasi. Hal ini bergantung pada ekspektasi dari para *stakeholder* tentang apakah kolaborasi akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Intensitas *stakeholder* dalam berpartisipasi juga

dipengaruhi oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan sumberdaya. (3) Pertimbangan Prasejarah. Sejarah masa lalu yang dimiliki oleh *stakeholder* dapat menjadi hambatan maupun dorongan dalam melakukan kolaborasi.

2. *Facilitative Leadership*

Kepemimpinan merupakan unsur yang sangat penting dalam mengatur kebijakan yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi proses dialog, serta mengeksplorasi adanya ketergantungan. Unsur kepemimpinan juga diperlukan dalam hal mendukung intensitas partisipasi dalam kolaborasi, karena apabila intensitas partisipasinya rendah akan mempengaruhi distribusi sumberdaya dan kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan untuk kolaborasi yang efektif.

3. *Institutional Design*

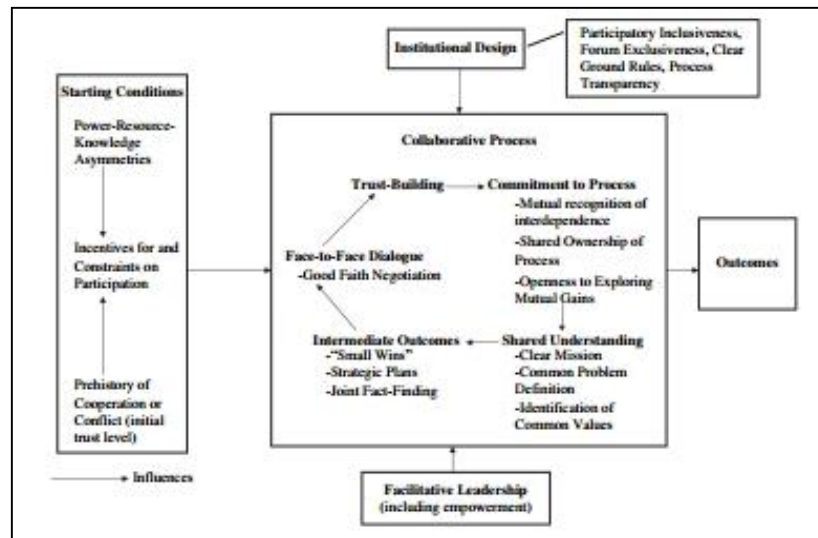
Desain kelembagaan disini mengacu pada aturan dasar untuk kolaborasi, yang mana sangat penting bagi legitimasi dari proses kolaborasi. Beberapa dari kelompok *stakeholder* mempunyai legitimasi untuk berpartisipasi dalam membangun komitmen pada proses kolaborasi. Legimitasi tersebut diartikan sebagai berikut (1) Kesempatan untuk melakukan deliberasi atau proses perundingan antar *stakeholder* mengenai hasil dari kebijakan; (2) Kesepakatan bahwa hasil dari kebijakan merupakan representasi dari konsensus atau kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan.

1.5.1.2. Proses Kolaborasi

Berdasarkan panduan perencanaan proses kolaborasi yang disusun oleh *Ministry for the Enviroment* dari Pemerintahan Selandia Baru (2017:6) menyebutkan bahwa proses kolaborasi merupakan suatu proses dimana sejumlah *stakeholder* terlibat dalam pembangunan dan perencanaan alternatif solusi dengan membangun hubungan kemitraan untuk berbagi pengetahuan dan bekerjasama guna menghasilkan pemahaman bersama akan suatu permasalahan. Penelitian ini berfokus pada penggunaan teori proses kolaborasi menurut Ansell

dan Gash untuk menjawab dan mendeskripsikan bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan antar *stakeholder* dalam mendukung keberhasilan Program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Bojonegoro.

Gambar I. 1 Model Collaborative Governance



Sumber : Ansell & Gash (2007:550)

Pada Gambar I.1 diatas, dapat diketahui bahwa model kolaborasi menurut Ansell dan Gash mengarah pada proses kolaborasi sebagai variabel inti dari model kolaborasi dengan didukung oleh komponen lainnya yaitu *starting condition* (kondisi awal), *institutional design* (desain kelembagaan), dan *facilitative leadership* (kepemimpinan). Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kondisi awal dibentuk untuk membangun kepercayaan antar *stakeholder*. Sedangkan, desain kelembagaan digunakan untuk menetapkan aturan dasar tentang pelaksanaan kolaborasi. Unsur kepemimpinan juga dibutuhkan sebagai mediator dalam kolaborasi. Proses kolaborasi disini dianggap sebagai suatu siklus yang terjadi secara berulang-ulang dengan keterkaitan antar komponen yang saling mempengaruhi. Berkaitan dengan kebijakan publik, kolaborasi dapat dijadikan pemerintah sebagai salah satu alternatif dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah publik. Melalui

konsesus atau kesepakatan bersama, komunikasi merupakan kunci utama dari proses kolaborasi. Maka dari itu, proses kolaborasi mempunyai beberapa variabel dimulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan perolehan hasil sementara. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai variabel proses kolaborasi menurut Ansell & Gash:

1.5.1.2.1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Dalam proses kolaborasi yang berorientasi konsensus, perlu dibangun komunikasi yang rutin antar *stakeholder*. Hal tersebut diterapkan dengan cara dialog tatap muka (*face to face dialogue*). Dialog tatap muka dianggap sebagai jantung dari proses kolaborasi karena berawal dari hal tersebut dapat membangun kepercayaan, rasa saling menghormati, berbagi pemahaman dan komitmen antar *stakeholder*. Etter et.al (2011) berasumsi bahwa tingkat interaksi antar *stakeholder* yang tinggi akan menghasilkan dialog secara berkelanjutan. Hal ini dinyatakan sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antar *stakeholder* dengan cara mengkomunikasikan komitmen melalui proses dialog. Foster & Jonker dalam Johansen (2011) mengartikan dialog sebagai proses komunikasi dua arah untuk membahas minat dan perhatian (kepentingan). Kaitannya dengan isu sosial, dialog tatap muka merupakan cara yang tepat untuk memulai hubungan yang kuat dengan *stakeholder*. Hal ini tidak hanya dapat membangun kepercayaan saja namun, juga mampu memberikan masukan yang berkualitas untuk mengidentifikasi peluang program secara berkelanjutan. Terdapat beberapa nilai tambah dari keterlibatan *stakeholder* dalam proses dialog yaitu (1) Dapat membangun kepercayaan *stakeholder*. Dengan adanya keterlibatan *stakeholder* bukan hanya dapat mendukung validasi pengambilan keputusan, tetapi juga dapat membangun hubungan dan kepercayaan antar *stakeholder*; (2) Dapat mengelola ekspektasi atau harapan *stakeholder*. Dialog tatap muka dapat dijadikan sebagai alat untuk menyeimbangkan harapan *stakeholder* serta mengelola kemungkinan risiko, peluang, dan keterbatasan sumberdaya; (3) Dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Merupakan

suatu *feedback* yang baik untuk meningkatkan hasil program, membantu mengidentifikasi risiko dan peluang, serta memprioritaskan sumberdaya yang relevan untuk gambaran progres yang diharapkan.³

1.5.1.2.2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Perbedaan pandangan, kekuasaan, dan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* perlu dikelola dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa proses kolaborasi tidak hanya tentang negosiasi atau membuat kesepakatan bersama namun, diperlukan juga membangun kepercayaan di antara para *stakeholder*. Dalam pelaksanaannya, membangun kepercayaan menjadi suatu hal yang paling menonjol pada awal proses kolaborasi yang kemungkinan sulit untuk ditanamkan. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya pengalaman terdahulu sebelum kolaborasi terjalin. Sehingga, membangun kepercayaan merupakan proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang bagi para *stakeholder* guna mencapai hasil kolaborasi yang diinginkan. Miztal dalam Karlsen et.al (2008) memandang *trust* (kepercayaan) sebagai hal yang penting dan utama dalam suatu program yang dilakukan oleh organisasi, karena dapat menstabilkan hubungan dalam rangka memelihara ikatan kerjasama dan interaksi rutin yang dibangun *stakeholder*.

1.5.1.2.3. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to the Process*)

Tingkat komitmen yang dimiliki oleh para *stakeholder* merupakan komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan. Hal ini disebabkan karena komitmen *stakeholder* menjadi faktor penting yang dapat mendukung proses kolaborasi, apabila komitmen yang dimiliki lemah akan memicu permasalahan. Komitmen kaitannya erat dengan motivasi diri untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Sehingga, komitmen terhadap proses adalah pembangunan keyakinan antar *stakeholder* bahwa kesepakatan bersama yang akan dilakukan ditujukan untuk

³<https://www.csreurope.org/strengthen-your-materiality-assessment-stakeholder-engagement#.XhvWmH8zbMw> Diakses pada 13 Januari 2020 10:52

kepentingan bersama supaya dapat mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Kolaborasi bukan bentuk kesepakatan untuk satu kali saja namun merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan secara berkelanjutan. Maka dari itu, untuk membangun konsistensi dari *stakeholders* yang berkontribusi dapat didukung oleh faktor pemberian insentif, baik berupa dukungan maupun *reward* sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang telah terlibat aktif dalam proses kolaborasi.

1.5.1.2.4. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pada titik tertentu dalam proses kolaborasi, para *stakeholder* harus membangun pemahaman bersama untuk dapat mencapai tujuan bersama secara kolektif. Arti pemahaman bersama cukup beragam dalam beberapa literatur, namun singkatnya pemahaman bersama merupakan kesepakatan dalam mendefinisikan masalah atau bisa berarti sebagai kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan. Menurut Vannella (2017:4) Salah satu elemen kunci dari kolaborasi adalah pemahaman bersama yang didefinisikan sebagai kesamaan dalam persepsi individu tiap *stakeholder* tentang bagaimana konseptualisasi desain konten atau bagaimana sistem transaksi informasi bekerja. Arias et.al (2000: 88) mengatakan bahwa dengan membawa sudut pandang yang berbeda ke dalam pemahaman bersama dapat menghasilkan gagasan dan wawasan baru, namun hal tersebut juga dapat menjadi tantangan ketika berupaya untuk mengintegrasikan berbagai perspektif yang muncul diantara *stakeholder*. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan dengan pembagian tugas dan menciptakan peluang bagi *stakeholder*. Dapat dikatakan bahwa proses pemahaman bersama ini menggabungkan informasi secara kolaboratif ke dalam konteks pemecahan masalah dan memberikan peluang yang lebih besar kepada *stakeholder* untuk dapat berpartisipasi. Hal ini juga mempengaruhi sinergitas interaksi antar *stakeholder* yang dapat menghasilkan ide dan perspektif dalam bentuk informasi untuk kepentingan masa depan.

1.5.1.2.5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil dari proses kolaborasi dianggap sebagai hal yang penting untuk membangun kondisi ke arah keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan tersebut dapat memberikan umpan balik (*feedback*) ke dalam proses sehingga mampu mendorong siklus dari membangun kepercayaan dan komitmen antar *stakeholder*. Hasil sementara yang dimaksud dalam konteks ini adalah representasi dari hasil yang terukur melalui pelaksanaan proses kolaborasi. Hal tersebut menjadi suatu kebutuhan yang dibangun untuk mencapai kolaborasi yang berhasil. Maka dari itu, dibutuhkan pembuatan target dalam rencana kerja untuk mengarahkan kolaborasi pada tujuan yang tepat. Dalam kondisi ini, kepercayaan (*trust*) dapat dibangun dengan melakukan eksplorasi bersama dari keseluruhan nilai yang terkandung dalam proses kolaborasi. Hasil sementara juga mempunyai makna yaitu kondisi di luar proses yang menciptakan hasil akhir yang diinginkan. Misal, mengubah perilaku manusia (Thomas, 2008: 5).

Dari sekian penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tata pemerintahan yang kolaboratif merupakan proses yang memakan waktu, khususnya dalam membangun kesepakatan bersama juga membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Ketika dalam membangun kepercayaan dianggap penting, maka diperlukan waktu yang signifikan untuk proses tersebut. Sehingga, pada kondisi tersebut para *stakeholder* tidak baik untuk membuat keputusan yang terlalu cepat karena harus melalui beberapa pertimbangan terlebih dahulu. Karena itu, melalui dialog bersama dengan *stakeholder* dan pencapaian hasil bersama yang sukses akan mengarahkan mereka kepada pemahaman yang baru tentang relasi yang mereka buat.

1.5.1.3. *Outcomes* Kolaborasi

Melalui komponen-komponen tersebut dapat diidentifikasi secara keseluruhan bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan menghasilkan *outcomes* yang positif. *Outcomes* tersebut dapat berupa klarifikasi permasalahan

atau isu, manajemen konflik yang efektif, peningkatan kepercayaan dan saling menghormati antar *stakeholder*, peningkatan operasional dalam pengambilan keputusan, integrasi pengetahuan yang relevan dalam pertimbangan keputusan, dan legitimasi yang lebih baik untuk kolaborasi (Emerson et.al 2011: 12-13). Sehingga, kolaborasi sangat bergantung pada pencapaian dalam siklus dinamis yang terdiri dari komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, dan hasil.

1.5.2. Keberhasilan Program

Menurut Thurston dan Potvin dalam Katherine (2011: 11) menjelaskan secara umum definisi program yaitu sebagai serangkaian kegiatan dan/atau layanan terstruktur yang ditujukan untuk memberikan perubahan pada situasi masalah yang mempengaruhi populasi. Berkaitan dengan keberhasilan program, UNDP (2009: 6-7) mengidentifikasi beberapa fokus area program yang harus diperhatikan secara konsisten. Fokus area tersebut diantaranya yaitu:

a. Definisi dan Perencanaan Program

Suatu program akan mempunyai potensi keberhasilan yang lebih besar, jika tujuan dan ruang lingkup program didefinisikan dan diklarifikasi dengan benar. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan adanya hambatan dalam implementasi.

b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Tingkat keterlibatan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) juga mempengaruhi keberhasilan program.

c. Komunikasi

Adanya komunikasi yang baik akan menghasilkan keterlibatan *stakeholder* semakin kuat. Komunikasi juga dapat memberikan kejelasan mengenai harapan, peran, tanggung jawab, dan informasi tentang pertumbuhan kinerja sehingga dapat memanfaatkan sumberdaya secara optimal.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Suatu program juga membutuhkan pengawasan yang kuat dan komponen evaluasi yang tepat.

Selanjutnya, terdapat aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai alat pendukung dalam menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu program. Aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1.5.2.1. Aspek Pendukung Keberhasilan Program

Berdasarkan pengertian *Project Management Institute* (PMI), Program adalah sejumlah proyek yang dikelola secara terkoordinasi untuk memperoleh hasil yang bermanfaat bagi organisasi yang di dalamnya mengandung beberapa elemen aktivitas (Weaver, 2010).Mihalic et.al (2004: 3) menyebutkan dalam mengimplementasikan program secara efektif, organisasi membutuhkan beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

a) Dukungan administratif

Program yang berhasil sangat bergantung pada dukungan administratif. Umumnya,dukungan secara administratif dianggap penting karena berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk program. Pelaksanaannya ditujukan untuk mengalokasikan sumberdaya dan membuat perubahan pada organisasi sehingga dapat memfasilitasi program. Dalam hal ini, dukungan secara administratif dilakukan pada waktu proses perencanaan program. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dukungan administratif yang memadai menunjukkan komitmen terhadap suatu program. Sehingga, pada saat penerapan para implementor dapat lebih termotivasi untuk menindaklanjuti dan mengarahkan program menjadi sukses.

b) Stabilitas Organisasi

Stabilitas dari organisasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas implementasi program. Stabilitas organisasi dapat dilihat melalui pelaksanaan bantuan teknis maupun kapasitas anggota yang memadai.

c) Visi Bersama

Melibatkan banyak individu dalam berbagi visi dan sasaran program adalah hal yang penting karena dapat mengubah ideologi dalam mengatasi suatu masalah. Maknanya, tiap individu perlu menyatukan visi mereka melalui diskusi untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi.

d) Jaringan antar Lembaga

Dalam mengkoordinasi program dibutuhkan sistem jaringan antar lembaga yang substansial untuk menuju program yang berhasil. Semua lembaga membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah dengan mengembangkan komunikasi dan sistem interaksi timbal balik secara berkelanjutan. Hal ini membantu tiap individu untuk dapat memahami dengan jelas program yang akan dilakukan.

1.5.2.2. Keberhasilan Program *Open Defecation Free* (ODF)

Program *Open Defecation Free* (ODF) merupakan program yang ditujukan untuk memicu kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan. Melalui program ini diharapkan pola pikir masyarakat tentang kesehatan sanitasi dapat berubah sehingga mereka mampu mengelola sendiri sanitasi yang sehat dan meninggalkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Program ODF ini merupakan salah satu pilar dari Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang telah dilaksanakan sejak 2008 dengan landasan hukum yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program tersebut. Program ini berupaya untuk mewujudkan masyarakat memiliki akses sanitasi dasar yaitu berupa jamban sehat.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, jamban sehat harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu:

- a) Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia.

- b) Dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Selain itu, jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan mudah dijangkau oleh penghuni rumah. Selanjutnya, ada beberapa pesan yang disampaikan kepada masyarakat dalam Program ODF yaitu sebagai berikut:

- Buang air besar sembarangan (BABS) akan mencemari lingkungan dan akan menjadi sumber penyakit.
- Buang air besar dengan cara yang aman dan sehat berarti menjaga harkat dan martabat diri dan lingkungan.
- Jangan jadikan kotoran yang dibuang sembarangan untuk penderitaan orang lain dan diri sendiri.
- Cara hidup sehat dengan membiasakan keluarga buang air besar yang aman dan sehat berarti menjaga generasi untuk tetap sehat.

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemecuan kepada masyarakat yaitu memfasilitasi proses dengan meminta dan mendengarkan pendapat masyarakat, membiarkan individu menyadarkan dirinya sendiri, membiarkan masyarakat menyampaikan inovasi jamban sederhana, dan tanpa subsidi. Sehingga, langkah-langkah pemecuan yang dilakukan harus melalui beberapa tahap di antaranya yaitu pengantar pertemuan, pencairan suasana, identifikasi istilah sanitasi, pemetaan sanitasi, penelurusan wilayah, diskusi, dan menyusun rencana program sanitasi. Proses pemecuan ini dilakukan satu kali dalam periode tertentu dengan batas waktu sekitar 1-3 jam dan dilakukan berulang-ulang sampai sejumlah masyarakat terpicu.

Program ini diturunkan ke pemerintahan daerah sesuai dengan otonomi yang dimiliki. Salah satu daerah yang menerapkan program ini adalah Kabupaten Bojonegoro. Berbeda dengan pusat, Program ODF menjadi salah satu parameter sehat dalam Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) yang

dilakukan pada tahun 2014 untuk mewujudkan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan masyarakat yang sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan program menjadi terstruktur karena diperkuat oleh payung hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Beberapa indikator dalam Program ODF yang menjadi alat ukur dalam pelaksanaan program yaitu penduduk yang memiliki jamban, penduduk yang belum memiliki jamban, penduduk yang menggunakan jamban, dan peraturan tentang ODF di tingkat desa/kelurahan. Sedangkan, dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 juga mengatur pula indikator untuk desa/kelurahan dapat dikatakan telah mencapai status stop buang air besar sembarangan diantaranya yaitu: (1) Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat termasuk di sekolah; (2) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar; (3) Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarangan tempat; (4) Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat; (5) Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.

Dalam melaksanakan program ini, dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk menciptakan sinergitas dalam mencapai tujuan program. Konsisten dan komitmen dari berbagai pihak juga dibutuhkan dalam melaksanakan tanggung jawab dan peran yang dimilikinya. Selain dari sektor pemerintah, program ini juga melibatkan banyak pihak dari sektor non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perusahaanswasta untuk mendukung berjalannya program melalui hubungan kerjasama atau kemitraan.

1.5.3. Hubungan antara Kolaborasi dan Keberhasilan Program

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, keberhasilan program dapat dilihat melalui beberapa aspek yaitu dukungan administratif, stabilitas organisasi, penyusunan visi bersama, dan jaringan antar lembaga. Aspek tersebut dapat pula

menentukan kualitas dari implementasi program. Hasil riset dari *International Centre for Programme Management of Cranfield University* (2013: 4), menyatakan bahwa program yang berhasil dipengaruhi oleh kekuatan dari pemangku kepentingan karenanya organisasi dapat menggunakan sumber daya yang memadai. Sedangkan, menurut *Office for Government Commerce* (2010: 3) menerangkan bahwa program membutuhkan komitmen dan keterlibatan yang aktif dari banyak organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Program dapat memberikan banyak manfaat berupa peningkatan *outcomes* yang terukur dan keuntungan bagi beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program juga dapat diukur oleh pengaruh dari pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Dalam melaksanakan program tentunya organisasi tidak dapat berjalan sendiri, oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk menyokong kebutuhan program secara efektif. Berkaitan dengan program pembangunan daerah, adalagi pilar dari beberapa sektor yang mempunyai peran tertentu di antaranya yaitu sektor pemerintah (*state*), sektor privat (*private sector*), organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) (Tasruddin, 2015). Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan hubungan kerjasama lintas sektor yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk kolaborasi antar *stakeholder*. Durlak (2013: 8) menyebutkan bahwa kolaborasi antar *stakeholder* mengarah pada kualitas dari implementasi kebijakan atau program. Kualitas implementasi dapat ditingkatkan pula dengan cara berkolaborasi dengan banyak pemangku kepentingan dan menggunakan pendekatan implementasi secara sistematis dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan tantangan implementasi dengan melakukan kolaborasi aktif dari empat kelompok besar *stakeholder* yaitu peneliti, praktisi lokal, penyandang dana/pembuat kebijakan, dan administrator lokal. Kelompok *stakeholder* tersebut masing-masing bertugas untuk memberikan bantuan teknis sesuai dengan bidangnya. Penjelasan tersebut disajikan pada gambar berikut.

Gambar I. 2 Kolaborasi antar *Stakeholder* dalam Kualitas Implementasi



Sumber : Durlak (2013)

Selain dapat menentukan kualitas impleementasi program, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dapat pula diatasi dengan kolaborasi antar *stakeholder*, karena dalam prosesnya keterlibatan *stakeholder* dapat mendukung kebutuhan sumber daya serta mampu memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program.

1. 6 Definisi Konsep

Berikut ini adalah definisi dari beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

a. Kolaborasi

Kolaborasi adalah upaya yang dilakukan oleh kumpulan individu dan kelompok dalam menemukan solusi dari permasalahan atau isu yang dihadapi melalui hubungan kerjasama yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

b. *Stakeholder*

Stakeholder adalah individu, kelompok, maupun organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu isu sehingga peran dan keberadaannya dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan dan hasil dari suatu keputusan.

c. Proses Kolaborasi

Proses Kolaborasi adalah proses inti dalam model kolaborasi yang memiliki beberapa komponen penting berupa dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil sementara yang dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat.

d. Keberhasilan Program

Keberhasilan program adalah implementasi program yang efektif dengan didukung beberapa aspek yaitu dukungan administratif, stabilitas agensi, visi bersama, dan jaringan antar lembaga.

e. Program *Open Defecation Free*

Program *Open Defecation Free* (ODF) adalah program yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan.

1.7 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah dibutuhkan pemilihan metode atau teknik yang tepat untuk menjelaskan suatu fenomena secara sistematis. Metode penelitian merupakan cara untuk mengetahui sesuatu atau memecahkan masalah melalui beberapa tahap sistematis (Sedarmayanti & Hidayat, 2002: 25). Tahapan tersebut di antaranya berisi tentang pemilihan metode, tipe penelitian, lokasi, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Satori & Komariah (2010 : 25) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan fakta melalui situasi sosial yang diungkap dalam bentuk kata-kata sesuai dengan teknik pengumpulan dan analisis data yang didapat dari situasi alamiah. Tujuan dari penggunaan metode kualitatif ini adalah untuk memahami gambaran mengenai fenomena sosial yang dikaji menjadi variabel yang saling berhubungan (Chairunnisa, 2017: 63). Alasan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai pedoman untuk mendapat pemahaman secara rinci mengenai gambaran situasi sosial yang terjadi, sehingga nantinya dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang akan diproses hingga ringkasan kesimpulan akhir.

1.7.1 Tipe Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan berbagai fenomena sosial di tengah masyarakat sebagai objek penelitian menjadi suatu gambaran tentang fenomena tertentu (Bungin, 2007: 68). Pendekatan ini berupaya untuk mencari unsur, sifat dan ciri-ciri dari suatu fenomena dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data yang ada di lapangan (Suryana, 2010). Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu menjawab tentang ‘apa’ dan ‘bagaimana’ makna dari realitas sosial yang akan diinterpretasikan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif ini, peneliti berusaha untuk mengungkapkan gambaran tentang proses kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam mendukung keberhasilan Program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Bojonegoro.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat tujuan untuk mencari data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian. Penentuan lokasi adalah salah satu tahap yang penting dalam penelitian karena, lokasi menjadi tempat

terjadinya suatu gejala atau fenomena sosial yang menjadi sumber data untuk ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian (Nugrahani, 2014: 112). Sesuai dengan objek penelitian ini, yaitu tentang proses kolaborasi antar *stakeholder* dalam mendukung keberhasilan Program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Bojonegoro, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bojonegoro sebagai instrumen untuk mendukung dalam memperoleh data dan informasi mengenai objek penelitian yang dibahas. Untuk mendapatkan data yang lebih konkrit, peneliti juga mempertimbangkan beberapa lokasi penelitian yang relevan dengan ruang lingkup para *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi bagi keberhasilan Program ODF di Bojonegoro.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam melaksanakan penelitian, dibutuhkan kumpulan data yang lengkap dan berkualitas, di antaranya yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber data yang sudah ada untuk mendukung data primer, seperti contoh dokumen atau buku. Sedangkan, data primer merupakan data lisan yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian sehingga, informasi yang diperoleh dapat dipercaya. Subjek penelitian yang dimaksud adalah informan (Siyoto & Sodik, 2015: 28).

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. Yang dimaksud dengan teknik *Purposive* adalah teknik penentuan informan dalam penelitian yang didasarkan atas pertimbangan kriteria tertentu (Prabowo, 2013). Alasan memilih teknik tersebut adalah untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan objek dan tujuan penelitian, sehingga peneliti dapat dengan cermat memilih informan yang sesuai dengan kriteria penelitian yaitu *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi Program ODF di Kabupaten Bojonegoro.

Informan penelitian ini meliputi beberapa unsur yaitu organisasi pemerintah, LSM, dan kelompok masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, mereka

merupakan pihak-pihak yang mengetahui, memahami, dan melaksanakan proses kolaborasi dalam mendukung keberhasilan Program ODF, sehingga mereka dapat memberikan data dan informasi yang akurat bagi peneliti untuk mendeskripsikan objek penelitian.

Berikut merupakan kelompok informan dari unsur pemerintah yang meliputi;

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
2. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
6. Puskesmas Bojonegoro

Kelompok informan dari unsur lembaga swadaya masyarakat meliputi:

1. IDFos Indonesia(*Institute Development of Society*)
2. Institut Studi Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (INSPEKTRA)

Kelompok informan dari unsur masyarakat meliputi:

1. Ketua RT
2. Karang Taruna
3. Warga desa/dusun

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, diperlukan teknik yang tepat untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Pemilihan teknik pengumpulan data yang relevan akan mempengaruhi hasil dari penelitian, sehingga yang perlu diperhatikan adalah teknik yang dipakai harus berkaitan dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Berdasarkan pendekatan kualitatif, sumber data

penelitian tidak berupa dalam bentuk angka dan tidak menggunakan rumus dalam mengolah dan menganalisis data. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Lebih lanjut lagi, data primer dapat diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan beberapa informan. Sedangkan, data sekunder dapat diperoleh dengan cara studi dokumentasi yang dapat berupa dokumen literatur, dokumen resmi pemerintah, referensi internet, dll. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Narbuko & Achmadi (2015: 83), “Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.” Maksud dari penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dengan cara mewawancarai subjek penelitian yang mempunyai interaksi dan keterkaitan secara langsung dengan objek penelitian. Manfaat dari penggunaan teknik wawancara yaitu wawancara mempunyai fungsi deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran secara objektif tentang fokus masalah penelitian. Dari perolehan gambaran tersebut, pelaksanaan penelitian akan menjadi lebih sistematis (Nasution, 2006: 114-115). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semistruktur (*semistructured interview*). Menurut Berg dalam Kartika (2016) Wawancara semistruktur merupakan teknik wawancara yang menggabungkan teknik wawancara terpimpin dan tidak terpimpin dengan cara menyusun pokok pertanyaan secara bebas dan tidak baku kepada subjek penelitian sesuai dengan situasinya. Instrumen dari teknik wawancara semistruktur adalah pedoman wawancara dan alat perekam suara. Pedoman wawancara tetap digunakan agar dapat memberikan jaminan terhadap hasil jawaban yang sama dari beberapa informan. Penyusunan pedoman wawancara harus tersusun secara rinci dan fokus kepada subjek tertentu sesuai dengan arah penelitian yang dituju meskipun hal tersebut tidak harus dilakukan secara ketat.

Kemudian, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan fokus masalah penelitian yang akan dibahas (Rachmawati, 2007).

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil gambar lokasi penelitian dan proses wawancara berlangsung di lapangan. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk dijadikan sebagai bukti lampiran penelitian serta mendukung hasil pencarian data dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

Sedangkan, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Dokumenter

Studi dokumenter merupakan teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis yang relevan dengan fokus masalah penelitian. Peninggalan tertulis tersebut dapat berupa arsip dan literatur buku yang membahas tentang pendapat, teori, dan hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Studi dokumenter ini berfungsi sebagai alat pembuktian yang objektif karena dapat dipercaya kebenarannya (Nawawi, 2005: 133). Dalam penelitian ini, studi dokumenter disajikan dari dokumen yang sudah ada seperti literatur buku, jurnal penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah, dan referensi internet sebagai sumber data pendukung.

1.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

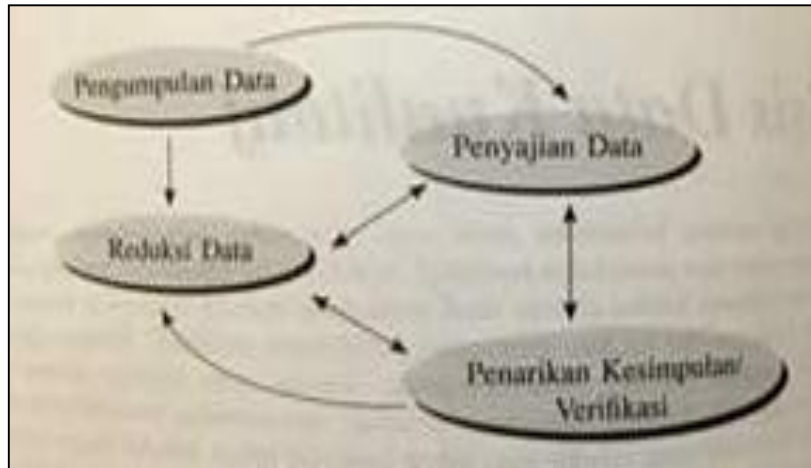
Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk pembuktian kredibilitas hasil penelitian yang ditentukan atas kriteria tertentu, dimana hasil penelitian tersebut sesuai dengan realita objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan dilakukan dengan cara triangulasi data. Triangulasi merupakan proses perbandingan sebagai cara untuk memeriksa keabsahan data melalui pengecekan dari berbagai sumber data lain. Lebih spesifik lagi triangulasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik,

dan triangulasi berdasarkan waktu. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yang berorientasi sumber berdasarkan hasil data wawancara dan studi dokumenter yang telah dilakukan oleh peneliti. Triangulasi diterapkan dengan melakukan pengecekan ulang terhadap sumber-sumber data yang berbeda dengan lebih menekankan perbandingan antara hasil wawancara dengan isi dokumen yang bersangkutan. Adapun teknik observasi tidak dapat dilakukan oleh peneliti karena situasi dan kondisi saat turun ke lapangan sedang dihadapi oleh wabah virus Covid-19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, teknik ini dilakukan untuk memastikan orisinalitas data berdasarkan perbandingan hasil temuan saat wawancara dengan pendapat informan atau narasumber yang berbeda kemudian dilakukan konfirmasi melalui studi dokumentasi (Iskandar, 2008: 230-232).

1.7.6 Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul harus diolah melalui tahap analisis. Menurut Afrizal (2017: 175), “Analisis data penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.” Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa serangkaian kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada model ini, ketiga hal tersebut merupakan siklus interaktif yang terjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk menuju tahap analisis. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk aktif selama pengumpulan data dan pada saat kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan hasil dari penelitian. Model interaktif Miles dan Huberman ini dapat dipetakan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar I. 3 Model Interaktif Miles dan Huberman



Sumber : Idrus (2009: 148)

Dari Gambar 1.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa reduksi data merupakan teknik menyusun data dengan mengubah data kasar di lapangan menjadi catatan tertulis untuk dianalisis melalui proses penarikan kesimpulan yang ditajamkan. Dalam hal ini, sumber data yang telah terkumpul dipilah lagi dengan selektif dan diuraikan dalam bentuk pola yang lebih luas. Setelah data diseleksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data untuk menyusun informasi yang di dapat. Penyajian data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu diuraikan dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk bagan, grafik, dll. Hal tersebut dapat memudahkan peneliti untuk menganalisis karena data dan informasi tergabung dalam sebuah pola tertentu. Penyajian data ini juga dapat memberikan bukti yang konsisten tentang objek penelitian sehingga dapat dengan mudah ditarik kesimpulan akhir. Penarikan kesimpulan dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu pemikiran ulang selama penulisan, meninjau kembali catatan lapangan, melakukan upaya tukar pikiran dengan pihak lain untuk memperoleh kesepakatan yang subjektif, mengembangkan temuan data ke dalam seperangkat data lain (Agusta, 2003: 10-11).